

KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN

Solikatun, Supono, Yulia Masruroh¹

Dr. Ahmad Zuber, DEA²

Jurnal Analisa Sosiologi

April 2014, 3(1): 70 – 90

Abstrak

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Namun Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan Negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa di tanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini. Ketidak sesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan dapat menimbulkan berbagai masalah. Perencanaan dan program pembanguan belum dapat menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia. Selain itu munculnya berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan. Karena itu dibutuhkan strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia.

Keywords: Program Pembangunan, Kemiskinan.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di masa yang akan datang, masyarakat kita jelas akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya. Hal ini didorong danya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional akan semakin terkait erat dengan adanya perkembangan nasional. Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan social budaya sebagai

¹ Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 57126

² Dosen Pascasarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 57126

pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan social budaya. Selo Soemardjan (1974) menyatakan bahwa “Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat”.(Soemardjan-Soemardi, 1974: 490).

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam suasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Hal ini juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Sementara, yang menjadi hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pada era masa kini, perencanaan pembangunan seolah-olah telah menjadi kegiatan utama yang sedang di galakkan oleh pemerintah. Dengan tujuan lain yaitu untuk mencapai modernisasi. Adanya keinginan untuk membuat Negara modern inilah kemudian semakin digalakkan kegiatan pembangunan. Bahkan kegiatan dan konsep pembangunan ini kemudian diterapkan dalam berbagai hal, seperti pembangunan desa, pembangunan kota, pembangunan daerah dll. Dan pada akhirnya semua sector mengalami pembangunan.

Dalam perkembangan lebih lanjut Syarif Moeis mengungkapkan bahwa, “suatu proses pembangunan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat yang terlibat dalam proses ini bisa memenuhi seperangkat kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai masalah dari dinamika masyarakatnya.” Lebih lanjut mengungkapkan bahwa “Terpaan dari faktor-faktor ekonomi yang menimbulkan krisis ekonomi pada tahun 1998 yang kemudian mengguncang sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat Indonesia secara

berkelanjutan seolah-olah memberikan gambaran yang jelas bahwa selama ini belum ada konsep atau bentuk pembangunan yang jelas dalam masyarakat ini". Dari adanya pernyataan diatas dapat dilihat bahwa sedemikian kurangnya pemahaman nilai-nilai dasar tentang konsep pembangunan dalam masyarakat.

Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan Negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa di tanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, pada-hal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan (sustainability) sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), tahun 2005 ada 35,10 juta penduduk miskin. Kemudian data tahun 2006 menjadi 39,05 juta. Artinya jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta. Pada tahun 2007 tercatat 37,17 juta orang. Dibandingkan tahun 2006, penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta.

Selain kegiatan pembangunan ada berbagai program-program pengentasan kemiskinan yang telah diupayakan untuk menanggulangi kemiskinan. Beberapa program tersebut diantaranya Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Tabungan Kesejahteraan Rakyat Kredit Usaha untuk Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Penanggulangan Dampak Kritis Ekonomi (PDM-DKE), dan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), kemudian diteruskan dengan program dana bergulirnya program subsidi langsung tunai/ Bantuan Langsung Tunai (SLT/BLT), bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program P2KP yaitu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Dari sederet program pengentasan kemiskinan di atas belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan yang melanda masyarakat. Menurut Ahmad Taufiq "Adanya

kelemahan mendasar yang menganggap warga miskin hanya membutuhkan modal atau bantuan cuma-cuma dari pemerintah dianggap menjadi penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan tersebut”.

Dari uraian di atas menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan. Tujuan pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa seolah hanya wacana saja. Semakin maraknya perencanaan dan kegiatan pembangunan belum mampu menanggulangi kemiskinan di Negeri Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa maraknya perencanaan dan program pembangunan belum dapat menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan di Negara Indonesia?
3. Bagaimana strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia?

Pembahasan

A. Kajian Pustaka

a) Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termakjub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan sederajat dengan bangsa yang lebih maju.

Menurut Suharto (2005:5) fungsi pembangunan nasional dapat dirumuskan dalam tiga tugas utama, antara lain : 1) fungsi pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada bagaimana melakukan wirausaha guna memperoleh pendapatan financial yang diperlukan untuk membiayai

kegiatan pembangunan. 2) Fungsi perawatan masyarakat yang menunjuk pada bagaimana merawat dan melindungi warga Negara dari berbagai macam resiko yang mengancam kehidupan. Dan 3) fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi SDM yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Secara teoritis, kegiatan nasional suatu bangsa yang menjadi kegiatan tak terpisahkan dari perkembangan internasional akan menumbuhkan apa yang biasa disebut dengan global governance. Oleh karena itu, persoalan-persoalan ekonomi dan politik semakin sukar dipecahkan dalam bingkai atau pola pikir Negara-bangsa.

Tujuan pembangunan itu sendiri adalah ingin menjadikan lebih makmur dan ingin agar demokrasi menjadi lebih sempurna, suatu kehidupan nasional yang lebih sempurna yang dapat member akomodasi kepada aneka warna kebudayaan bangsa, dan dapat menghasilkan lebih banyak karya yang bisa membanggakan sebagai bangsa (Koentjaraningrat, 2002 : 84). Dalam melakukan pembangunan ada akibat dan aspek negatif dari kemakmuran serta demokrasi yang terlampau ekstrem, antara lain : 1) individualism ekstrem serta isolasi individu, 2) keretakan prinsip-prinsip kekeluargaan, 3) hilangnya nilai-nilai hidup rohaniah yang mempertinggi mutu hidup, 4) penggunaan kelebihan harta dan waktu luang yang tak wajar, dan 5) polusi dan pencemaran lingkungan hidup.

Menurut koentjaraningrat (2002 : 36) suatu bangsa yang hendak mengintensifkan usaha untuk pembangunan harus berusaha agar banyak dari warganya : 1) lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan, dan bersifat hemat untuk bisa lebih teliti memperhitungkan hidupnya di masa depan, 2) lebih menilai tinggi hasrat explorasi untuk mempertinggi kapasitas berinovasi, 3) lebih menilai tinggi orientasi ke arah *achievement* dari karya, dan 4) menilai tinggi mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri sendiri, berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri.

b) Kemiskinan

Menurut BPS dan Depos (2002:4) dalam Suharto, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standart kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makanan, yang disebut

garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Dari segi ekonomi, kemiskinan adalah kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan : kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto, 2004). Dari segi politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks politik Friedman mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi : a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), b) sumber keuangan (pekerjaan dan kredit), c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, parpol, organisasi sosial), d) jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, e) pengetahuan dan ketrampilan, dan f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, 2004). Dari segi sosial psikologis, kemiskinan adalah kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang

lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya meliputi: Pertama, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Penyebab kemiskinan diantaranya :

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
3. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.
4. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur social dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan. Dan yang paling penting adalah Ketidakmerataannya Distribusi Pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas, David Cox (dalam Suharto,2004) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan.
3. Kemiskinan sosil.
4. Kemiskinan konsekuensial.

Ukuran Kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (basic need). Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :

a. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b. Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Relatif

Menurut Kincaid (1975) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin. Yakni dengan melihat hubungan antara populasi terhadap distribusi pendapatan.

c) Teori Dependensi

Teori dependensi muncul pertama kali di Amerika Latin sebagai akibat atau reaksi balik terhadap kegagalan teori modernisasi. Pada awal kelahirannya, teori ini lebih merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh ECLA (*Economic Commission for Latin Amerika*). Lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mampu menggerakkan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori Modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa. Teori dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga.

Teori dependensi lahir dari dua induk, yaitu pertama, Raul Prebisch : industri substitusi import. Menurut Prebisch keterbelakangan di negara-negara Amerika Latin akibat dari terlalu mengandalkan ekspor barang-barang primer. Dan Negara-negara yang terbelakang harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor. Prebisch tidak menganjurkan system ekonomi di pimpin oleh Negara seperti yang dilakukan Negara sosialis. Kedua, Paul Baran: sentuhan yang mematkan dan kretinisme. Baginya perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran beda dengan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pinggiran, system kapitalisme yang dikembangkan seperti terkena penyakit kretinisme yang membuat orang tetap kerdil.

Dalam perkembangannya, teori dependensi terbagi dua, yaitu dependensi klasik yang diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos, dan dependensi baru yang diwakili oleh F.H. Cardoso.

1. Andre Gunder Frank : Pembangunan keterbelakangan. Bagi Frank keterbelakangan hanya dapat diatasi dengan revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis.
2. Theotonia De Santos : Theotonio Dos Santos mendefinisikan bahwa negara-negara pinggiran atau satelit pada dasarnya merupakan bayangan dari negara-negara pusat atau metropolis. Bila negara pusat berkembang dengan baik maka negara satelit akan berkembang dan bila negara pusat terjadi krisis maka negara satelit akan mengalami krisis. Menurutnya ada 3 bentuk ketergantungan, yakni :
 - a. Ketergantungan Kolonial: hubungan antar penjajah negara pusat dan negara pinggiran bersifat eksploitatif.
 - b. Ketergantungan Finansial-Industri: pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan financial-industri.
 - c. Ketergantungan Teknologis-Industrial: penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industri. Menurut Dos Santos bahwa keterbelakangan yang ada disebabkan karena ekonomi negara-negara yang kurang menyatu dengan kapitalisme, tetapi sebaliknya, hambatan yang paling besar bagi pembangunan di negara-negara adalah karena menyatukan diri dengan system internasional dan mengikuti hukum perkembangannya. Bagi Dos Santos kapitalisme bukan kunci pemecahan masalah, melainkan penyebab dari timbulnya masalah.
3. Henrique Cardoso : kemajuan yang berhasil dilakukan di negara pinggiran menyisakan beberapa masalah. Masalah tersebut adalah ketimpangan yang makin besar, mengutamakan produk konsumsi mewah dan tahan lama serta bukan pada kebutuhan dasar rakyat banyak, berakibat hutang yang menumpuk, menghasilkan kemiskinan, kurang terserap dan cenderung mengeksploitasi tenaga kerja.

Dalam perspektif Teori dependensi tentang negara miskin Santos mengamsusikan bahwa bentuk dasar ekonomi dunia memiliki aturan-aturan perkembangannya sendiri, tipe hubungan ekonomi yang dominan di negara pusat adalah kapitalisme. Santos menjelaskan bagaimana timbulnya kapitalisme yang dapat menguasai sistem ekonomi dunia. Keterbatasan sumber daya pada negara maju mendorong mereka untuk melakukan ekspansi besar-besaran pada negara miskin. Pola yang dilakukan

memberikan dampak negatif berupa adanya ketergantungan yang dialami oleh negara miskin.

B. Pembahasan

1. Perencanaan dan program pembangunan belum dapat menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada abad ini terlihat telah berhasil membawa kesejahteraan dan berbagai kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Meskipun kemudahan hidup dengan munculnya teknologi baru telah menggiring manusia ke arah kehidupan manusia yang lebih baik dan sejahtera, tetapi ternyata hanya sebagian saja yang dapat menikmati kemajuan itu, sebagian lainnya masih tetap bergelimpang dengan kehidupan tradisional (Sairin, 2002:265-266).

Menurut Chambers (1987) kemiskinan dianggapnya sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan lebih tepat disebut sebagai perangkat kemiskinan (*deprivation trap*). Lima unsur penyebab kemiskinan yang saling terkait yaitu : ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerawanan atau kerentanan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan isolasi (*isolation*) (<http://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/teori-pembangunan.html>).

Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah “pusat - periferi”. Pola hubungan antara pusat-periferi ini dijelaskan oleh Frank bahwa kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara pusat sedang melemah. Pendapat ini merupakan antitesis dari modernisasi yang menyatakan bahwa kemajuan negara dunia ketiga hanya dapat dilakukan dengan hubungan dan difusi dengan negara maju .

Dampak dari ketergantungan ini terhadap dunia ketiga adalah ketimpangan pembangunan, ketimpangan kekayaan, eksploitasi tenaga kerja, serta terbatasnya perkembangan pasar domestik negara dunia ketiga itu sendiri. Asumsi dasar teori dependensi ini menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan.

Hal ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan teoritis Dependensi di atas bahwa kemiskinan di suatu negara disebabkan karena faktor eksternal. Kemiskinan dilihat sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunannya. Munculnya kemiskinan juga diakibatkan oleh bias pembangunan yang hanya bertumpu pada filsafat ketergantungan (*dependensi*) terhadap negara-negara maju dan modern. Jika pola dan ideology pembangunan masih tetap seperti itu dengan mengadopsi teori dan praktek ideology barat, maka pembangunan Indonesia akan menyisakan sejumlah persoalan seperti kemiskinan.

Faktanya pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, belum menyentuh kepentingan masyarakat secara universal dan komprehensif, pembangunan hanya mampu diperuntukan untuk kepentingan para pemilik modal, pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Paradigma pemerataan yang dihembuskan oleh pemerintah belum bisa diwujudkan secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari biasanya pembangunan tersebut, maka terciptalah masyarakat miskin. Karena itu, model pembangunan seharusnya bertumpu pada keinginan masyarakat, sebab kenyataannya antara keinginan pemerintah sebagai elit pembangunan seringkali bersebrangan dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan di Negara Indonesia.

Tingkat kemiskinan di Indonesia setiap tahun meningkat, menurut data statistik tentang tingkat kemiskinan jumlah penduduk yang hidup di

bawah garis kemiskinan pada bulan maret 2006 dan sebanyak 39,90 juta jiwa (17,75 %) dibandingkan pada bulan februari 2005 jumlah penduduk yang mengalami peningkatan sebesar 3,95 juta jiwa. (Data BPS). Berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan telah diadakan oleh pemerintah, namun belum dapat membuahkan hasil. Menurut Alif Basuki (2007) Ada dua faktor penting yang menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung fokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin, kedua adanya latar belakang paradigma dan pemahaman yang kurang tepat tentang kemiskinan itu sendiri sehingga program penanggulangan kemiskinan ini tidak tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan haruslah berperspektif kepada hak. Artinya Negara harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak dll.

Menurut Ritonga (2003) bahwa, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kelemahan mendasar, antara lain: (1) pembangunan terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek pemerataan, (2) cenderung lebih menekankan pendekatan sektoral yang kurang terintegrasi, dan (3) kurang mempertimbangkan persoalan-persoalan kemiskinan yang multidimensi (Mega, 2003). Suharto (2003) menambahkan bahwa, hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi dan paradigma yang bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang berpusat pada produksi. Metode yang digunakan masih belum mencerminkan dinamika kemiskinan karena belum mampu menggali akar penyebab kemiskinan menurut konsep masyarakat miskin itu sendiri, bukan menurut orang luar. (<http://www.oocities.org/koedamati/masariku231104c.htm>).

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten atau kota, maupun di tingkat komunitas. Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data

mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah. Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pula diluncurkan berbagai Inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang agak belakangan namun cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dapat dicatat juga program-program pemberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK),

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), dan seterusnya. Hampir semua departemen mempunyai program penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program-program tersebut telah mencapai puluhan trilyun rupiah.

Sebagaimana dikemukakan di atas, struktur perekonomian Indonesia dengan mudah ambruk karena berat di atas rapuh di bawah. Hal itu terjadi karena kurang seimbangny perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomi kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak dibarengi pemerataan merupakan kesalahan besar yang dilakukan para pemimpin negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam menjalankan strategi tersebut, pinjaman luar negeri telah memainkan peran besar sebagai sumber pembiayaan. Padahal, sering terjadi adanya ketidaksesuaian antara paket pembangunan yang dianjurkan donor dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumber daya alam kurang hati-hati dan tidak bertanggung

jawab, perencanaan pembangunan bersifat top-down, pelaksanaan program berorientasi keproyekan, misleading industrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yang memadai untuk melindungi kemungkinan terpinggirkannya kelompok-kelompok miskin di dalam masyarakat. (<http://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalan-kebijakan-dan-program-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia>)

3. Strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia.

Emil Salim (dalam A.L Slamet Ryadi,1982: 119) memberikan pemikiran tentang strategi pembangunan nasional, yang pada garis besarnya diartikan sebagai suatu proses dinamis dan merupakan usaha kearah tingkat kesejahteraan serta keadilan yang lebih baik,di mana upaya-upaya ini tidak akan boleh berhenti melainkan harus berlangsung terus.Suatu performance pembangunan betapapun baiknya, ada kalanya bisa juga menciptakan masalah-masalah pembangunan yang lain. Kompleksitas permasalahan dapat juga diperbesar justru karena luasnya wilayah permasalahan yang makin luas.Beliau mengemukakan bahwa makin terbatas pendapatan seseorang,semakin sekedar kebutuhannya.Sebaliknya makin besar pendapatannya,besar pula kebutuhannya.Karena kebutuhan itu adalah reletif maka pembangunan itu adalah proses tanpa akhir dan harus dikerjakan oleh suatu bangsa yang ingin terus maju dan harus dapat merupakan sebagai suatu kontinuitas perjuangan bagi bangsanya.

Pembangunan ekonomi mula-mula menggunakan tahap strategi pertumbuhan dengan berusaha mengejar kenaikan produksi nasional setinggi mungkin.Strategi tersebut mula-mula juga dikenal dengan istilah Growth strategy on GNP Oriented. Dalam pertumbuhan ini kurang diributkan siapa yang berdominasi dalam kegiatan investasi modal maupun perdagangan.Untuk memungkinkan growth strategi ini berkembang prasyarat stabilitas moneter justru sangat menentukan.Pada mulanya pengejaran terhadap target GNP yang semata-mata dapat naik memang menakjubkan.tetapi sejarah membuktikan, bahwa pada Negara-negara sedang berkembang dengan penduduk yang sangat besar,ternyata keadaan ini belum memberikan kesempatan yang cukup untuk golongan kecil

terbesar dari penduduk dalam menikmati hasil pembangunan ini. (A.L Slamet Ryadi,1982: 121)

Kemudian muncul strategi pembangunan dengan keadilan, yang tumbuh setelah memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada pada strategi pembangunan dengan stabilitas sebelumnya itu. Strategi pembangunan dengan keadilan menekankan bahwa pertumbuhan pembangunan itu harus mampu melahirkan keadilan social yang merata yang bukan saja diperlihatkan oleh kenaikan GNP tetapi juga menghilangkan adanya kemelaratan. Strategi ini juga disebut dengan istilah lain sebagai *Growth Strategy with Distributive Justice* atau *Growth with social justice*. Sehingga dari sini bila ingin mengevaluasi keberhasilan pembangunan, maka bukan penilaian hanya terhadap indicator keberhasilan ekonomi saja yang perlu dievaluasi, tetapi juga terhadap keberhasilan segi social. Strategi ini adalah untuk mengharapkan adanya pengaruh apa yang disebut *trickle down effects* yaitu suatu keberhasilan ekonomi tanpa kepincangan social yang berselubung. Menghindarkan yang kaya menjadi makin kaya, sedangkan yang miskin agar tidak sebaliknya semakin menjurus menjadi melarat. Dengan strategi ini diharapkan adanya pertumbuhan, yang mampu memberikan pembagian pendapatan yang lebih merata serta perluasan kerja yang luas. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, pelayanan social maupun perlindungan hukum keseluruhannya timbal-balik bias memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas individu untuk berkembang secara lebih baik. Kemampuan individu yang mampu menumbuhkan *self-reliance* untuk lebih lanjut berkembang pada suatu kemampuan yang disebut *self-propelling growth*. Sebaliknya diharapkan dapat mengurangi dan mengakhiri ketergantungan tidak saja pada pemerintah, tetapi juga mengakhiri ketergantungan ekonomi bangsa kepada pihak luar. (A.L Slamet Ryadi,1982: 122-123)

Sebagai bagian dari permasalahan pembangunan, sudah sewajarnya jika strategi penanggulangan kemiskinan dilandasi atas pemahaman terhadap konsep pembangunan. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu perubahan struktur yang dimulai dari upaya memperbaiki kapabilitas

manusia, sehingga memiliki peluang memasuki kesempatan kerja dan berusaha, memperoleh peningkatan pendapatan, hingga akhirnya mampu secara mandiri melakukan perlindungan social yang merupakan wujud nyata keberhasilan pembangunan kesejahteraan social.

Dengan perubahan struktur sebagai langkah operasional dan manusia sebagai sasaran, maka strategi penanggulangan kemiskinan yang paling tepat adalah pemberdayaan masyarakat. Makna pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan secara terfokus sekaligus dapat menghindari penggunaan dana pemerintah untuk kegiatan yang tidak produktif. Sasaran yang menjadi focus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan adalah penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun. Penduduk miskin pada kisaran ini yang sehat secara jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Disamping itu, penduduk berusia produktif juga merupakan individu yang berada pada fase berumah tangga, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menciptakan penduduk miskin baru. (Gunawan Sumodiningrat, 2009: 6 - 7)

Pemerintah menjalankan fungsi sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat miskin ditempatkan sebagai pelaku usaha berskala mikro. Adapun perbankan dan dunia usaha diharapkan dapat menyediakan pembiayaan serta akses pemasaran. Kesenjangan komunikasi yang terjadi diantara masyarakat miskin selaku sasaran dengan pemerintah dan perbankan serta dunia usaha dijumpai melalui tenaga pendamping yang berfungsi sebagai manajer social dan sekaligus penggerak pembangunan di tingkat local. Kondisi kemiskinan secara teoritis diakibatkan oleh adanya kegagalan atau distorsi pasar yang membawa konsekuensi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pasar yang terdistorsi mengakibatkan rendahnya tingkat tabungan masyarakat dan penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga tidak terjadi penumpukan modal yang

berakibat tidak terjadi pertumbuhan ekonomi riil. Masyarakat tidak memperoleh peluang yang memadai untuk bekerja dan berusaha, sehingga tidak memiliki pendapatan dan tabungan yang mencukupi untuk menjalani kehidupan. Terjadi pengangguran, kesenjangan dan kemiskinan yang dapat disebut sebagai perangkap atau lingkaran kemiskinan yaitu sebuah lingkaran proses pemiskinan yang semakin lama semakin kronis, sehingga secara bertahap dapat menghancurkan tatanan ekonomi suatu Negara. (Gunawan Sumodiningrat,2009: 8)

Potensi kegagalan pasar lebih lanjut tentu saja harus dicegah melalui berbagai langkah konkret yang untuk mendorong kegiatan ekonomi riil yang dihasilkan dari adanya akumulasi modal dan investasi, baik yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan perbankan. Investasi dalam model perekonomian pasar bersumber dari tabungan masyarakat, penerimaan pajak dan pinjaman dari dalam maupun luar negeri. Fakta empirik membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang stabil, berkualitas dan berkelanjutan pada suatu negara hanya dapat terjadi apabila ditunjang oleh kecukupan investasi yang berasal dari sumber domestic, khususnya tabungan masyarakat. Investasi dalam konteks penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui penguatan kelembagaan keuangan mikro yang member akses modal dan teknologi yang sesuai untuk menciptakan peluang bekerja dan berusaha. Investasi tersebut secara riil dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan menggerakkan roda perekonomian yang dimulai dari tingkat lokal. (Gunawan Sumodiningrat,2009: 9)

Tugas berat bagi pemerintah saat ini maupun pemerintah selanjutnya dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Tentu kita mengharapkan, pemimpin-pemimpin negara ini tidak lagi terpecah-pecah dengan beragam keinginan partai melainkan menjadi satu untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran ini.

Masalah kemiskinan di manapun adalah masalah yang sangat sulit untuk diselesaikan. Berikut ada 16 cara yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut yaitu:

- a. Hapuskan larangan impor beras.

- b. Lakukan investasi di bidang pendidikan dengan fokus pada perbaikan akses dan keterjangkauan sekolah menengah serta pelatihan ketrampilan bagi masyarakat miskin, sambil terus meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah dasar.
- c. Lakukan investasi di bidang kesehatan dengan fokus pada perbaikan mutu layanan kesehatan dasar (oleh pemerintah dan swasta) dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.
- d. Suatu upaya khusus diperlukan untuk menangani angka kematian ibu yang sangat tinggi di Indonesia.
- e. Perbaiki mutu air bagi masyarakat miskin dengan menggunakan strategi berbeda antara daerah pedesaan dengan perkotaan.
- f. Tangani krisis sanitasi yang dihadapi Indonesia dan masyarakat miskinnya.
- g. Luncurkan program berskala besar untuk melakukan investasi pembangunan jalan desa.
- h. Perluas (sampai tingkat nasional) pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD) Indonesia yang sukses.
- i. Pengembangan secara utuh sistem jaminan sosial komprehensif yang mampu menangani risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan hampir miskin.
- j. Revitalisasi pertanian melalui investasi di bidang infrastruktur dan membangun kembali riset dan penyuluhan.
- k. Memperlancar sertifikasi tanah dan memanfaatkan kembali tanah gundul dan tidak subur untuk penggunaan yang produktif.
- l. Membuat peraturan ketenagakerjaan yang lebih fleksibel.
- m. Perluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan tingkatkan akses usaha mikro dan kecil ke pinjaman komersial.
- n. Perbaiki fokus kepada kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional untuk penyediaan layanan.
- o. Jalankan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
- p. Perkuat monitoring dan kajian terhadap program kemiskinan.(<http://firmansyahsi.kumbang.blogspot.com/2012/06/masalah-dan-strategi-pengentasan.html>)

Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya maraknya perencanaan pembangunan dan berbagai kegiatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah belum bisa mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Jika dilihat dari realita atau fenomena yang

terjadi justru sebaliknya, jumlah kemiskinan semakin meningkat. Adanya ketidak merataan pembangunan dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan pembangunan yang menimbulkan kemiskinan. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan telah diterapkan juga guna mengatasi fenomena kemiskinan, namun kiranya belum bisa mampu mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai faktor muncul dan menyebabkan kegagalan penanggulangan kemiskinan di Negara Indonesia. Kurang tepatnya penanggulangan yang dilakukan pemerintah mengakibatkan fenomena kemiskinan akan selalu ada. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pemahaman pemerintah mengenai kemiskinan tersebut. Dan masih banyak faktor-faktor lain yang kemudian mengganggu jalannya program kemiskinan. Dari adanya kegagalan tersebut perlu adanya strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia. Strategi ini kiranya dapat menanggulangi dan mengurangi jumlah kemiskinan dan mampu mewujudkan cita-cita yang telah ada tercantum dalam UUD 1945. Pemerintah diharapkan mampu merencanakan dan memeratakan pembangunan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 2002. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntjoro, Dorodjatun. 1986. *Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moeis, Syarif. 2008. *Masyarakat Indonesia Dalam Pendekatan Teori Modernisasi dan Teori dependensi*.
- Ryadi , A.L Slamet. *Pembangunan Dasar Dasar dan Pengertiannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Agus. 2006. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Semarang : UNNES PRESS.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Taufiq, Ahmad dkk. *Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal*.

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

<http://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/teori-pembangunan.html>.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/anthropology/2135213-pengertian-tujuan-dan-hakikat-pembangunan/>

<http://www.oocities.org/koedamati/masariku231104c.htm>

<http://crackbone.wordpress.com/penyebab-kegagalan-kebijakan-dan-program-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia>

<http://firmansyahsikumbang.blogspot.com/2012/06/masalah-dan-strategi-pengentasan.html>